

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pada lampiran VI bagian E.1.1 dan E.1.2 menyatakan bahwa Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renja SKPD kepada kepala Bappeda, dan Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan-rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SOPD dengan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi daerah agar sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan amanat yang sudah dituangkan dalam aturan perundangan maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan telah menyelesaikan susunan Laporan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Tahun 2022.

Demikian Laporan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 ini kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Balangan.

Paringin, Agustus 2022.
Kepala Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup



Drs. H. MUSA, MAR
NIP. 196801131990031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB. iv PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas yang melibatkan berbagai pihak baik Perencana, Pengambil Keputusan, Penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah, maupun dunia usaha serta masyarakat. Oleh karenanya kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina agar pengelolaan dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja (Renja) mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi, terutama dalam mencapai tujuan akhir organisasi.

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja), suatu satuan kerja dapat membangun strateginya sebagai bagian terpenting dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708-Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018)
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

3. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi setiap unit atau PNSD di lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pelayanan tahunan masing-masing sub satuan kerja. Sedangkan tujuannya antara lain untuk:

1. Menyiapkan antisipasi perubahan yang akan terjadi secara pro-aktif;
2. Membangun strategi pencapaian hasil kerja tahun 2022;
3. Memberikan komitmen pada aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022;
4. Meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar sub satuan kerja atau antar PNSD lingkup Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
5. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Untuk menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan serta memperhatikan situasi-situasi internal dan eksternal tahun berjalan;
7. Untuk menyusun pedoman pencapaian kinerja tahunan sebagai aktualisasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara sistematis, terencana, terarah dan berkesinambungan, sekaligus menampung aspirasi masyarakat dan integrasi dengan program/kegiatan sektor lainnya (lintas sektor).

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dikaitkan dengan target renstra periode berjalan.

BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Pada bab ini berisi dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.

BAB VI. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan di SKPD pada tahun berjalan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Renja Sampai Triwulan II

Realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2022 sampai triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2022 pada Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar Rp. 13.638.017.294,-
2. Realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar Rp. 7.144.804.172,-

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada APBD yang telah dilakukan sebagai berikut:

| No | Kode | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi | |
|----|-----------------|---|--|--|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|
| | | | | | | I | | II | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 12 | |
| 1. | 2.10.02 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | Persentase Pengelolaan Izin Lokasi | 100 % | 12.200.000 | 25 % | 0 | 50 % | 8.915.000 | 50 % | 8.915.000 |
| | 2.10.02.2.01 | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) daerah kabupaten | 100 % | 12.200.000 | 25 % | 0 | 50 % | 8.915.000 | 50 % | 8.915.000 |
| 1. | 2.10.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data penerbitan Izin Lokasi dalam 1 tahun | 12 Kali | 12.200.000 | 0 Kali | 0 | 0 Kali | 8.915.000 | 0 Kali | 8.915.000 |
| 2. | 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN | Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan | 100 % | 35.003.000 | 25 % | 480.000 | 50 % | 480.000 | 50 % | 480.000 |
| | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 100 % | 35.003.000 | 25 % | 480.000 | 50 % | 480.000 | 50 % | 480.000 |
| 2. | 2.10.04.2.01.02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Di Daerah | 8 Kegiatan | 35.003.000 | 2 Kegiatan | 480.000 | 0 Kegiatan | 480.000 | 2 Kegiatan | 480.000 |
| 3. | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee | 100 % | 3.600.000 | 25 % | 0 | 50 % | 0 | 50 % | 0 |
| | 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Kelebihan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | 100 % | 3.600.000 | 25 % | 0 | 50 % | 0 | 50 % | 0 |
| 3. | 2.10.06.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PPL Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria | 1 Kegiatan | 3.600.000 | 0 Kegiatan | 0 | 0 Kegiatan | 0 | 0 Kegiatan | 0 |
| 4. | 2.10.09 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Persentase pengelolaan izin membuka tanah | 100 % | 200.460.000 | 25 % | 11.440.000 | 50 % | 41.570.100 | 50 % | 41.570.100 |
| | 2.10.09.2.01 | Penerbitan Izin Membuka Tanah | Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah | 100 % | 200.460.000 | 25 % | 11.440.000 | 50 % | 41.570.100 | 50 % | 41.570.100 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 4. | 2.10.09.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penghimpunan Bahan Penyusunan Dasar Hukum IMT | 5 Kali | 51.480.000 | 0 Kali | 2.640.000 | 0 Kali | 14.960.100 | 0 Kali | 14.960.100 |
| 5. | 2.10.09.2.01.02 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Jumlah Terdaftar Permohonan Hak di Kantor Pertanahan | 6 Persil | 148.980.000 | 0 Persil | 8.800.000 | 0 Persil | 26.610.000 | 0 Persil | 26.610.000 |
| 5. | 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Penatagunaan Tanah | 100 % | 16.987.000 | 25 % | 0 | 50 % | 2.000.000 | 50 % | 2.000.000 |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penatagunaan Tanah | 100 % | 16.987.000 | 25 % | 0 | 50 % | 2.000.000 | 50 % | 2.000.000 |
| 6. | 2.10.10.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 2 Kali | 16.987.000 | 0 Kali | 0 | 0 Kali | 2.000.000 | 0 Kali | 2.000.000 |
| 6. | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 6.289.576.094 | 25 % | 1.860.357.275 | 50 % | 4.238.644.802 | 50 % | 4.238.644.802 |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di sampaikan Tepat Waktu | 100 % | 95.478.900 | 25 % | 8.800.000 | 50 % | 38.142.500 | 50 % | 38.142.500 |
| 7. | 2.11.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang di Sampaikan Tepat Waktu | 100 % | 66.180.000 | 25 % | 6.160.000 | 50 % | 23.152.500 | 50 % | 23.152.500 |
| 8. | 2.11.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Yang di Sampaikan Tepat Waktu | 100 % | 29.298.900 | 25 % | 2.640.000 | 50 % | 14.990.000 | 50 % | 14.990.000 |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 4.548.607.594 | 25 % | 1.529.623.497 | 50 % | 3.456.055.096 | 50 % | 3.456.055.096 |
| 9. | 2.11.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 4.472.257.294 | 25 % | 1.524.343.497 | 50 % | 3.426.945.096 | 50 % | 3.426.945.096 |
| 10. | 2.11.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 100 % | 55.202.100 | 25 % | 2.640.000 | 50 % | 18.920.000 | 50 % | 18.920.000 |
| 11. | 2.11.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 100 % | 21.148.200 | 25 % | 2.640.000 | 50 % | 10.190.000 | 50 % | 10.190.000 |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 104.500.000 | 25 % | 54.000.000 | 50 % | 54.000.000 | 50 % | 54.000.000 |
| 12. | 2.11.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 19 Bimtek | 104.500.000 | 9 Bimtek | 54.000.000 | 9 Bimtek | 54.000.000 | 9 Bimtek | 54.000.000 |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 1.042.166.000 | 25 | 218.706.834 | 50 | 521.955.421 | 50 | 521.955.421 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13. | 2.11.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Buah | 50.500.000 | 0 Buah | 0 | 0 Buah | 0 | 0 Buah | 0 |
| 14. | 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 1300 Lembar | 15.915.000 | 0 Lembar | 0 | 7000 Lembar | 2.937.300 | 7000 Lembar | 2.937.300 |
| 15. | 2.11.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 360 Sampler | 8.400.000 | 90 Sampler | 0 | 180 Sampler | 1.260.000 | 180 Sampler | 1.260.000 |
| 16. | 2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 % | 967.351.000 | 25 % | 218.706.834 | 50 % | 517.758.121 | 50 % | 517.758.121 |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 263.155.600 | 25 % | 28.521.952 | 50 % | 87.983.437 | 50 % | 87.983.437 |
| 17. | 2.11.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 24.200.000 | 3 Bulan | 0 | 6 Bulan | 3.000.000 | 6 Bulan | 3.000.000 |
| 18. | 2.11.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 119.998.500 | 3 Bulan | 25.001.952 | 6 Bulan | 49.326.237 | 6 Bulan | 49.326.237 |
| 19. | 2.11.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 15.300.000 | 3 Bulan | 0 | 6 Bulan | 700.000 | 6 Bulan | 700.000 |
| 20. | 2.11.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 103.657.100 | 3 Bulan | 3.520.000 | 6 Bulan | 34.957.200 | 6 Bulan | 34.957.200 |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 235.668.000 | 25 % | 20.704.992 | 50 % | 80.508.348 | 50 % | 80.508.348 |
| 21. | 2.11.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10 Buah | 180.540.000 | 3 Buah | 13.664.992 | 6 Buah | 59.388.348 | 6 Buah | 59.388.348 |
| 22. | 2.11.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3 Buah | 55.128.000 | 1 Buah | 7.040.000 | 2 Buah | 21.120.000 | 2 Buah | 21.120.000 |
| 7. | 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup | 100 % | 215.510.000 | 25 % | 1.760.000 | 50 % | 64.240.000 | 50 % | 64.240.000 |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/Kota | 100 % | 215.510.000 | 25 % | 1.760.000 | 50 % | 64.240.000 | 50 % | 64.240.000 |
| 23. | 2.11.02.2.02.01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | 1 Dokumen | 215.510.000 | 0 Dokumen | 1.760.000 | 0 Dokumen | 64.240.000 | 0 Dokumen | 64.240.000 |
| 8. | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan | 50 % | 757.444.000 | 12,5 % | 70.600.000 | 25 % | 202.822.000 | 25 % | 202.822.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|-----------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan | 50 % | 657.444.000 | 12,5 % | 69.240.000 | 25 % | 196.112.000 | 25 % | 196.112.000 |
| 24. | 2.11.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Titik Tanah, Air dan Udara Yang di Amati | 30 Titik Pantau | 150.000.000 | 8 Titik Pantau | 8.620.000 | 16 Titik Pantau | 18.010.000 | 16 Titik Pantau | 18.010.000 |
| 25. | 2.11.03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | 10 % | 50.000.000 | 2,5 % | 9.370.000 | 0 % | 10.540.000 | 2,5 % | 10.540.000 |
| 26. | 2.11.03.2.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Parameter Sampel Yang di Uji | 20 Parameter | 457.444.000 | 5 Parameter | 51.250.000 | 10 Parameter | 167.562.000 | 10 Parameter | 167.562.000 |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan | 100 % | 50.000.000 | 25 % | 0 | 50 % | 0 | 50 % | 0 |
| 27. | 2.11.03.2.02.03 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Penghentian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup | 1 Lokasi | 50.000.000 | 0 Lokasi | 0 | 0 Lokasi | 0 | 0 Lokasi | 0 |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan | 100 % | 50.000.000 | 25 % | 1.360.000 | 50 % | 6.710.000 | 50 % | 6.710.000 |
| 28. | 2.11.03.2.03.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Jumlah Rehabilitasi | 1 Lokasi | 50.000.000 | 0 Lokasi | 1.360.000 | 0 Lokasi | 6.710.000 | 0 Lokasi | 6.710.000 |
| 9. | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dalam Kondisi yang terpelihara dengan baik | 100 | 1.876.862.900 | 25 | 198.328.245 | 50 | 775.572.540 | 50 | 775.572.540 |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Dalam Kondisi Yang Terpelihara Dengan Baik | 100 % | 1.876.862.900 | 25 % | 198.328.245 | 50 % | 775.572.540 | 50 % | 775.572.540 |
| 29. | 2.11.04.2.01.03 | Pengelolaan Kebun Raya | Jumlah Pengelolaan Kebun Raya | 1 Lokasi | 302.709.000 | 1 Lokasi | 43.672.000 | 1 Lokasi | 110.072.647 | 1 Lokasi | 110.072.647 |
| 30. | 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang di Kelola | 3 Lokasi | 1.574.153.900 | 3 Lokasi | 154.656.245 | 3 Lokasi | 665.499.893 | 3 Lokasi | 665.499.893 |
| 10. | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 100 % | 73.960.000 | 25 % | 2.020.000 | 50 % | 9.580.000 | 50 % | 9.580.000 |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 100 % | 38.280.000 | 25 % | 2.020.000 | 50 % | 5.440.000 | 50 % | 5.440.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|-------------------|------------|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------|
| 31. | 2.11.05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara B3 | 10 Verifikasi | 38.280.000 | 2 Verifikasi | 2.020.000 | 15 Verifikasi | 5.440.000 | 15 Verifikasi | 5.440.000 |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 100 % | 35.680.000 | 25 % | 0 | 50 % | 4.140.000 | 50 % | 4.140.000 |
| 32. | 2.11.05.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Limbah B3 Yang di Kelola | 2 Usaha/Kegiatan | 35.680.000 | Usaha/Kegiatan | 0 | 1 Usaha/Kegiatan | 4.140.000 | 1 Usaha/Kegiatan | 4.140.000 |
| 11. | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan | 100 % | 37.061.300 | 25 % | 6.320.000 | 50 % | 17.190.000 | 50 % | 17.190.000 |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan | 100 % | 37.061.300 | 25 % | 6.320.000 | 50 % | 17.190.000 | 50 % | 17.190.000 |
| 33. | 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan Usaha/Kegiatan Yang Ijin Lingkungan Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah | 10 Usaha/Kegiatan | 37.061.300 | 2 Usaha/Kegiatan | 6.320.000 | 3 Usaha/Kegiatan | 17.190.000 | 3 Usaha/Kegiatan | 17.190.000 |
| 12. | 2.11.07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan MHA Yang Terkait dengan PPLH | 100 % | 25.000.000 | 25 % | 0 | 50 % | 5.830.000 | 50 % | 5.830.000 |
| | 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan MHA Yang Terkait Dengan PPLH | 100 % | 25.000.000 | 25 % | 0 | 50 % | 5.830.000 | 50 % | 5.830.000 |
| 34. | 2.11.07.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah MHA dan Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional Yang di Verifikasi | 1 Lokasi | 25.000.000 | 0 Lokasi | 0 | 0 Lokasi | 5.830.000 | 0 Lokasi | 5.830.000 |
| 13. | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat | 100 % | 25.645.000 | 25 % | 0 | 50 % | 904.000 | 50 % | 904.000 |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | 100 % | 25.645.000 | 25 % | 0 | 50 % | 904.000 | 50 % | 904.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Masyarakat | | | | | | | | |
| 35. | 2.11.08.2.01.03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 1 Penyuluhan | 25.645.000 | 0 Penyuluhan | 0 | 0 Penyuluhan | 904.000 | 0 Penyuluhan | 904.000 |
| 14. | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 100 % | 119.340.000 | 25 % | 2.115.000 | 50 % | 23.580.000 | 50 % | 23.580.000 |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 100 % | 119.340.000 | 25 % | 2.115.000 | 50 % | 23.580.000 | 50 % | 23.580.000 |
| 36. | 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat, Lembaga, Dunia Usaha, Pendidikan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH | 3 Penilaian | 119.340.000 | 0 Penilaian | 2.115.000 | 1 Penilaian | 23.580.000 | 1 Penilaian | 23.580.000 |
| 15. | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 100 % | 40.900.000 | 25 % | 6.060.000 | 50 % | 13.720.000 | 50 % | 13.720.000 |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 100 % | 40.900.000 | 25 % | 6.060.000 | 50 % | 13.720.000 | 50 % | 13.720.000 |
| 37. | 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani | 5 Kasus | 40.900.000 | 0 Kasus | 6.060.000 | 0 Kasus | 13.720.000 | 0 Kasus | 13.720.000 |
| 16. | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Pengelolaan Persampahan | 99 % | 3.908.468.000 | 16,5 % | 532.260.320 | 40,34 % | 1.739.755.730 | 40,34 % | 1.739.755.730 |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Persentase Pengelolaan Persampahan | 99 % | 3.908.468.000 | 16,5 % | 532.260.320 | 40,34 % | 1.739.755.730 | 40,34 % | 1.739.755.730 |
| 38. | 2.11.11.2.01.02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Pengurangan Sampah | 26 % | 648.150.000 | 6,5 % | 84.458.300 | 9,34 % | 260.578.000 | 9,34 % | 260.578.000 |
| 39. | 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Penanganan Sampah | 73 % | 3.260.318.000 | 10 % | 447.802.020 | 31 % | 1.479.177.730 | 31 % | 1.479.177.730 |

Sumber : e money Bappedalitbangda triwulan 2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Catatan Analisis |
|----|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2021 | |
| 1 | Indeks Kualitas Air | - | 50.20 | 50.20 | 50.95 | |
| 2 | Indeks Kualitas Udara | - | 91.05 | 91.05 | 91.09 | |
| 3 | Indeks Kualitas Lahan | - | 53.99 | 53.99 | 51.60 | |

Permasalahan/Hambatan

Beberapa permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan antara lain:

1. Kurangnya tenaga teknis pemantauan terhadap kualitas air, udara, dan tenaga penganalisis kualitas lingkungan hidup;
2. Kurangnya dukungan dari dinas terkait dalam program adiwiyata sehingga sekolah-sekolah yang diusulkan masih dirasa kurang baik materi pendidikan maupun sarpras yang ramah lingkungan;
3. Belum maksimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dikarenakan kurangnya personil serta anggaran yang tidak memadai;
4. Jumlah personil dan banyaknya obyek pengawasan yang tidak sebanding;
5. Peralatan pengawasan serta pemantauan yang belum maksimal;
6. Belum maksimalnya pengetahuan perusahaan tentang kewajiban pengelolaan lingkungan hidup;

7. Perbedaan persepsi terhadap peraturan limbah B3 di perusahaan antara pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan, sehingga menimbulkan permasalahan di lapangan;
8. Sulitnya pengawasan terhadap perusahaan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Provinsi maupun pusat, sehingga pengawasan lingkungan di dunia usaha tidak berjalan optimal;
9. Belum semua bagian dari Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki turunan;
10. Kurang sosialisasi mengenai peraturan bidang lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, sehingga menyulitkan pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan;
11. Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil yang memahami proses penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL yang terbatas;
12. Masih kurangnya peralatan dan sarana penunjang operasional laboratorium lingkungan;
13. Jenis pelatihan yang dipersyaratkan untuk personel lab masih ada yang belum terpenuhi;
14. Kesulitan mendapatkan data terbaru dari instansi terkait. Selain itu kadang terdapat perbedaan data untuk objek yang sama;
15. Keterbatasan SDM yang menguasai Sistem Informasi Geografis.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Diperlukan tambahan tenaga teknis untuk pemantauan kualitas air, udara dan tenaga penganalisis data lingkungan;
2. Melakukan koordinasi tentang instrumen tata cara pengawasan sesuai dengan perundang-undangan;
3. Melakukan pengawasan bersama pengendalian pencemaran;
4. Rekrutmen tenaga ahli dan usulan penambahan staf;
5. Melakukan usulan pengadaan peralatan pengawasan;
6. Sosialisasi peraturan perundangan tentang kewajiban dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
7. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah tentang kebijakan mengenai pengelolaan limbah B3;
8. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat selaku penerbit izin pengumpul limbah B3 dan transporter limbah B3;
9. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengawasan bersama;
10. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;
11. Penambahan Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan/ Diklat Penilai AMDAL;
12. Rapat koordinasi bersama kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD;
13. Perlu adanya pembinaan yang lebih intensif dari Provinsi dan Pusarpedal juga adanya komitmen Kepala Perangkat Daerah di 13 kabupaten/kota agar laboratorium yang ada dapat berjalan dengan baik dan juga dapat mempertahankan status akreditasi;

14. Mengadakan peralatan dan sarana penunjang untuk operasional laboratorium lingkungan;
15. Memenuhi pelatihan yang dipersyaratkan untuk kualifikasi masing-masing personel laboratorium;
16. Lebih mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten;
17. Diharapkan dengan lebih melatih SDM yang ada dan jika memungkinkan menambah personil yang menguasai GIS.

2.3 Analisis Sosial Ekonomi SKPD.

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan yaitu pada tujuan daerah :

A. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan daerah meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam misi daerah ke satu yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran daerah yang ingin di capai adalah agar kualitas lingkungan hidup meningkat dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Strategi daerah yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran daerah tersebut adalah dengan :

a) Meningkatkan Indeks Kualitas Air, udara dan lahan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka strategi daerah tersebut adalah dengan :

1. Peningkatan pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R.
2. Peningkatan Kuantitas dan kinerja bank sampah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
4. Peningkatan kebersihan jalan.

5. Peningkatan ketertiban dokumen lingkungan.
6. Peningkatan pemulihan LH, pengendalian perubahan iklim dan emisi GRK
7. Peningkatan konservasi air, udara dan tanah.
8. Peningkatan ketertiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (PPLH)
9. Peningkatan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan.
10. Peningkatan pemantauan penataan dokumen lingkungan
11. Peningkatan pengujian parameter kualitas air, udara dan lahan.
12. Peningkatan pemahaman dan serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
13. Peningkatan pemantauan reklamasi pasca tambang.
14. Peningkatan pembangunan RTH public.

Pada program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup ada beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan sosial ekonomi masyarakat diantaranya adalah Program pengelolaan persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati).

Keberadaan sampah saat ini telah menjadi masalah nasional, maka kedepannya diharapkan pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Persampahan domestik saat ini lebih banyak dimusnahkan dengan metode in-situ, yaitu dengan dibakar dan dibuang ke lahan-lahan kosong sekitar perumahan. Sementara untuk sampah pasar dan sebagian perumahan perkotaan dikumpulkan dan diangkut ke TPA Batu Merah. Kegiatan pengelolaan sampah eksisting di Kabupaten Balangan dilakukan

dengan cara pengumpulan oleh masyarakat/petugas yang ditunjuk, sampah yang diangkut dari wadah-wadah rumah/persil kemudian dimuat ke gerobak-gerobak untuk selanjutnya dimasukkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sampah-sampah yang dipilah dapat dijual kembali ke pengepul sampah sedangkan sampah basah dimanfaatkan menjadi maggot atau dijadikan pupuk organik dan sampah yang tidak terpakai di angkut ke TPA. Dari kegiatan pemanfaatan sampah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengelolaan persampahan.

Ketersediaan ruang terbuka dan Ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Balangan Regulasi yang mengatur batasan minimal sebesar 30% RTH harus dipenuhi secara bertahap. Proses pelaksanaannya memerlukan strategi terobosan untuk dapat membangun RTH publik di Kabupaten Balangan dengan diiringi kualitas dan sebarannya dari tingkat kota, kecamatan, desa kelurahan sampai dusun/lingkungan yang ideal bagi lingkungan yang seimbang. RTH di permukiman padat di pusat kota atau lingkungan cepat tumbuh menjadi kendala karena ketersediaan lahan.

Ruang terbuka hijau (RTH) dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan membuka usaha dari makan minum, cinderamata, jasa penyewaan, penginapan, dll sehingga masyarakat dapat manfaat lebih dari ruang terbuka hijau. Sosial, ruang terbuka hijau merupakan tempat/media masyarakat untuk saling berinteraksi mendapatkan kebutuhan rekreatif. RTH juga berfungsi sebagai kegiatan sosial ini terlihat pada beberapa RTH kemudian peran atau fungsi dari RTH sangat terlihat bahwa sumber perekonomian masyarakat dapat terbantu oleh adanya kunjungan masyarakat di RTH.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2022, program yang akan dilaksanakan sebanyak 16 program, Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Pendanaan yang direncanakan sebesar Rp. 22.096.174.355,- Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berlokasi di lingkungan kantor, masyarakat, sekolah, sungai dan beberapa perusahaan wilayah Kab. Balangan.

| Kode | Program | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| | | | | Kelompok Sasaran | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | |
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | |
| (1) | (2) | (4) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=12-11 | (14) | (15) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 6,289,576,094 | 8,697,087,355 | 2,407,511,261 | APBD | APBD |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di sampaikan Tepat Waktu | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di sampaikan Tepat Waktu | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 95,478,900 | 95,478,900 | - | APBD | APBD |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang di Sampaikan Tepat Waktu | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang di Sampaikan Tepat Waktu | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 66,180,000 | 66,180,000 | - | APBD | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang di Sampaikan Tepat Waktu | Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang di Sampaikan Tepat Waktu | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 29,298,900 | 29,298,900 | - | APBD | APBD |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 4,548,607,594 | 6,257,070,855 | 1,708,463,261 | APBD | APBD |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 4,472,257,294 | 6,180,720,555 | 1,708,463,261 | APBD | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 55,202,100 | 55,202,100 | - | APBD | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 21,148,200 | 21,148,200 | - | APBD | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------|------|
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 104,500,000 | 104,500,000 | - | APBD | APBD |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 19 Bimtek | 19 Bimtek | 104,500,000 | 104,500,000 | - | APBD | APBD |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 1,042,166,000 | 1,642,328,000 | 600,162,000 | APBD | APBD |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 3 Buah | 3 Buah | 50,500,000 | 50,500,000 | - | APBD | APBD |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 1300 Lembar | 1300 Lembar | 15,915,000 | 15,915,000 | - | APBD | APBD |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 360 Sampler | 360 Sampler | 8,400,000 | 8,400,000 | - | APBD | APBD |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 967,351,000 | 1,567,513,000 | 600,162,000 | APBD | APBD |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 263,155,600 | 305,041,600 | 41,886,000 | APBD | APBD |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 24,200,000 | 19,200,000 | (5,000,000) | APBD | APBD |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 119,998,500 | 119,998,500 | - | APBD | APBD |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,300,000 | 15,300,000 | - | APBD | APBD |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 103,657,100 | 150,543,100 | 46,886,000 | APBD | APBD |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ASN | ASN | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 235,668,000 | 292,668,000 | 57,000,000 | APBD | APBD |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemerintah daerah dan masyarakat | Pemerintah daerah dan masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 10 Buah | 10 Buah | 180,540,000 | 237,540,000 | 57,000,000 | APBD | APBD |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemerintah daerah dan masyarakat | Pemerintah daerah dan masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 3 Buah | 3 Buah | 55,128,000 | 55,128,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup | Pemerintah daerah dan masyarakat | Pemerintah daerah dan masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 215,510,000 | 215,510,000 | - | APBD | APBD |
| | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/Kota | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 215,510,000 | 215,510,000 | - | APBD | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 215,510,000 | 215,510,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan | Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 50% | 50% | 777,444,000 | 777,443,650 | (350) | APBD | APBD |
| | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 50% | 50% | 677,444,000 | 677,443,650 | (350) | APBD | APBD |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Titik Tanah, Air dan Udara Yang di Amati | Jumlah Titik Tanah, Air dan Udara Yang di Amati | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 30 Titik Pantau | 30 Titik Pantau | 150,000,000 | 124,999,800 | (25,000,200) | APBD | APBD |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 10% | 10% | 50,000,000 | 74,999,900 | 24,999,900 | APBD | APBD |
| | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Parameter Sampel Yang di Uji | Jumlah Parameter Sampel Yang di Uji | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 20 Parameter | 20 Parameter | 477,444,000 | 477,443,950 | (50) | APBD | APBD |
| | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | - | APBD | APBD |
| | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Penghentian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Penghentian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 50,000,000 | 50,000,000 | - | APBD | APBD |
| | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | - | APBD | APBD |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Jumlah Rehabilitasi | Jumlah Rehabilitasi | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 50,000,000 | 50,000,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dalam Kondisi yang terpelihara dengan baik | Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dalam Kondisi yang terpelihara dengan baik | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100 | 100 | 1,918,862,900 | 2,277,009,300 | 358,146,400 | APBD | APBD |
| | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Dalam Kondisi Yang Terpelihara Dengan Baik | Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Dalam Kondisi Yang Terpelihara Dengan Baik | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 1,918,862,900 | 2,277,009,300 | 358,146,400 | APBD | APBD |
| | Pengelolaan Kebun Raya | Jumlah Pengelolaan Kebun Raya | Jumlah Pengelolaan Kebun Raya | Usaha/Kegiatan | Usaha/Kegiatan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 314,709,000 | 314,708,800 | (200) | APBD | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|------|------|
| | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang di Kelola | Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang di Kelola | Usaha/Kegiatan | Usaha/Kegiatan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 3 Lokasi | 3 Lokasi | 1,604,153,900 | 1,962,300,500 | 358,146,600 | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Usaha/Kegiatan | Usaha/Kegiatan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 73,960,000 | 73,960,000 | - | APBD | APBD |
| | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Usaha/Kegiatan | Usaha/Kegiatan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 38,280,000 | 38,280,000 | - | APBD | APBD |
| | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara B3 | Jumlah Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara B3 | Usaha/Kegiatan | Usaha/Kegiatan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 10 Verifikasi | 10 Verifikasi | 38,280,000 | 38,280,000 | - | APBD | APBD |
| | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Usaha/Kegiatan | Usaha/Kegiatan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 35,680,000 | 35,680,000 | - | APBD | APBD |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Limbah B3 Yang di Kelola | Jumlah Limbah B3 Yang di Kelola | Usaha/Kegiatan | Usaha/Kegiatan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 2 Usaha/Kegiatan | 2 Usaha/Kegiatan | 35,680,000 | 35,680,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan | Usaha/Kegiatan | Usaha/Kegiatan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 37,061,300 | 37,061,050 | (250) | APBD | APBD |
| | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 37,061,300 | 37,061,050 | (250) | APBD | APBD |
| | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan Usaha/Kegiatan Yang Ijin Lingkungan Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah | Jumlah Pengawasan Usaha/Kegiatan Yang Ijin Lingkungan Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 10 Usaha/Kegiatan | 10 Usaha/Kegiatan | 37,061,300 | 37,061,050 | (250) | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan MHA Yang Terkait dengan PPLH | Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan MHA Yang Terkait dengan PPLH | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | - | APBD | APBD |
| | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan MHA Yang Terkait Dengan PPLH | Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan MHA Yang Terkait Dengan PPLH | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | - | APBD | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah MHA dan Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional Yang di Verifikasi | Jumlah MHA dan Kearifan Lokal Atau Hak Pengetahuan Tradisional Yang di Verifikasi | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 25,000,000 | 25,000,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 25,645,000 | 25,645,000 | - | APBD | APBD |
| | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat | Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan | Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 25,645,000 | 25,645,000 | - | APBD | APBD |
| | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Masyarakat/Lembaga/Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan | Masyarakat/Lembaga/Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 1 Penyuluhan | 1 Penyuluhan | 25,645,000 | 25,645,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Masyarakat/Lembaga/Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan | Masyarakat/Lembaga/Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 119,340,000 | 119,340,000 | - | APBD | APBD |
| | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Masyarakat/Lembaga/Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan | Masyarakat/Lembaga/Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 119,340,000 | 119,340,000 | - | APBD | APBD |
| | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat, Lembaga, Dunia Usaha, Pendidikan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH | Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat, Lembaga, Dunia Usaha, Pendidikan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH | Usaha/Kegiatan dan Masyarakat | Usaha/Kegiatan dan Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 3 Penilaian | 3 Penilaian | 119,340,000 | 119,340,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Usaha/Kegiatan dan Masyarakat | Usaha/Kegiatan dan Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 40,900,000 | 40,900,000 | - | APBD | APBD |
| | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Usaha/Kegiatan dan Masyarakat | Usaha/Kegiatan dan Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 40,900,000 | 40,900,000 | - | APBD | APBD |
| | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani | Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani | Usaha/Kegiatan dan Masyarakat | Usaha/Kegiatan dan Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 5 Kasus | 5 Kasus | 40,900,000 | 40,900,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Pengelolaan Persampahan | Persentase Pengelolaan Persampahan | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 99% | 99% | 3,908,468,000 | 9,538,968,000 | 5,630,500,000 | APBD | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | Pengelolaan Sampah | Persentase Pengelolaan Persampahan | Persentase Pengelolaan Persampahan | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 99% | 99% | 3,908,468,000 | 9,538,968,000 | 5,630,500,000 | APBD | APBD |
| | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Pengurangan Sampah | Jumlah Pengurangan Sampah | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 26% | 26% | 648,150,000 | 655,650,000 | 7,500,000 | APBD | APBD |
| | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Penanganan Sampah | Jumlah Penanganan Sampah | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 73% | 73% | 3,260,318,000 | 4,060,768,000 | 800,450,000 | APBD | APBD |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | Masyarakat | | Kab. Balangan | | 8 Unit | | 4,822,550,000 | 4,822,550,000 | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | Persentase Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase Pengelolaan Izin Lokasi | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 12,200,000 | 12,200,000 | - | APBD | APBD |
| | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) daerah kabupaten | Persentase Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) daerah kabupaten | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 12,200,000 | 12,200,000 | - | APBD | APBD |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data penerbitan Izin Lokasi dalam 1 tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data penerbitan Izin Lokasi dalam 1 tahun | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 12 Kali | 12 Kali | 12,200,000 | 12,200,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan | Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 35,003,000 | 35,003,000 | - | APBD | APBD |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 35,003,000 | 35,003,000 | - | APBD | APBD |
| | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Di Daerah | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Di Daerah | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 35,003,000 | 35,003,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian kelebihan tanah absentee | Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian kelebihan tanah absentee | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 3,600,000 | 3,600,000 | - | APBD | APBD |
| | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Kelebihan Tanah Absentee dan Tanah Absentee | Persentase Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Kelebihan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 3,600,000 | 3,600,000 | - | APBD | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|------|------|
| | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PPL Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PPL Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 3,600,000 | 3,600,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Persentase pengelolaan izin membuka tanah | Persentase pengelolaan izin membuka tanah | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 200,460,000 | 200,460,000 | - | APBD | APBD |
| | Penerbitan Izin Membuka Tanah | Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 200,460,000 | 200,460,000 | - | APBD | APBD |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penghimpunan Bahan Penyusunan Dasar Hukum IMT | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penghimpunan Bahan Penyusunan Dasar Hukum IMT | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 5 Kali | 5 Kali | 51,480,000 | 51,480,000 | - | APBD | APBD |
| | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Jumlah Terdaftar Permohonan Hak di Kantor Pertanahan | Jumlah Terdaftar Permohonan Hak di Kantor Pertanahan | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 6 Persil | 6 Persil | 148,980,000 | 148,980,000 | - | APBD | APBD |
| | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Penatagunaan Tanah | Persentase Penatagunaan Tanah | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 16,987,000 | 16,987,000 | - | APBD | APBD |
| | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penatagunaan Tanah | Persentase Penatagunaan Tanah | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 100% | 100% | 16,987,000 | 16,987,000 | - | APBD | APBD |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Masyarakat | Masyarakat | Kab. Balangan | Kab. Balangan | 2 Kali | 2 Kali | 16,987,000 | 16,987,000 | - | APBD | APBD |
| JUMLAH AKUMULASI PERUBAHAN | | | | | | | | | | 13,700,017,294 | 22,096,174,355 | 8,396,157,061 | | |

Paringin, Agustus 2022.
Kepala Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup.



Drs. H. MUSA, M.AP.
NIP. 19680113 199703 1 007

BAB IV P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan ini disusun sebagai arah kebijakan kegiatan perencanaan yang akan direalisasikan pada tahun 2022 mendatang. Renja ini merupakan penjabaran empiris dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, khususnya yang berkenaan dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, di lain pihak pembuatan Renja Perubahan ini juga sebagai perwujudan atas tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan zaman harus dijalankan secara efisien dan efektif, berdayaguna dan berhasil guna serta harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip "**Good Governance.**"

Dengan demikian, keberadaan konsepsi Renja oleh setiap SOPD sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi dan peran SOPD yang bersangkutan agar dapat diciptakan kondisi yang maju dan proporsional secara terencana, sistematis, terarah, bertahap dan berkesinambungan.

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyadari benar bahwa, kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih memwirausahakan birokrasi pemerintah. Dengan kata lain mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (**Inputs Oriented Accountability**) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (**Results Oriented Accountability**). Kita bersama tentunya tidak ingin lagi ada instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat.

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mendorong agar penyelenggaraan pelayanan di seluruh wilayah kabupaten balangan dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata pemerintahan yang baik yang menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (**Results Oriented Government**).

Terakhir, bahwa Renja ini bersifat intern dan dinamis. Artinya dipergunakan untuk kalangan terbatas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, namun bersifat fleksibel terhadap berbagai macam perubahan dan tuntutan baik yang dimunculkan oleh lingkungan internal maupun eksternal. Dinamis, berarti Renja Perubahan Tahun 2022 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang harus mampu menggambarkan kondisi yang jauh lebih baik daripada kondisi-kondisi sebelumnya dan harus mampu memberikan arahan bagi peningkatan dan pengembangan kondisi selanjutnya.

Paringin, Agustus 2022
Kepala Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup.

Drs. H. MUSA, M.AP
NIP. 19680413-199703-1-007

